

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR SINGKATAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xiii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 15
2.1 Kerangka Teori	16
2.1.1 Teori Tentang Anggaran	16
2.1.1.1 Prinsip-Prinsip Anggaran Publik	20
2.1.1.2 Fungsi Anggaran	22
2.1.2 Politik Dalam Anggaran Publik	24
2.1.2.1 Anggaran Sebagai Arena Pertarungan Politik	
2.1.2.2 Faktor Anggaran Sebagai Arena Pertarungan Politik	
2.2 Kepentingan Politik Dalam APBD	32
2.3 Kepentingan Publik Dalam APBD	34
2.4 <i>Stakeholder</i> Dalam Anggaran	37
2.5 Teori Keagenan Dalam Politik Anggaran	39
2.6 Kerangka Berfikir	41
2.7 Definisi konsep	42

2.4 Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Fokus Penelitian	45
3.2 Lokasi dan Situs Penelitian	46
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Instrumen Penelitian	53
3.6 Analisis Data	53
3.6.1 Metode Analisis Isi	54
3.6.1.1 Menentukan Unit Analisis	54
3.6.1.2 Menentukan Indikator	55
3.6.2 Metode Analisis Interaktif	55
3.6.2.1 Reduksi Data.....	56
3.6.2.2 Penyajian Data (Data Display).....	56
3.6.2.3 Menarik Kesimpulan	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROSES	
 PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH	58
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1 Kondisi Politik Kabupaten Pangandaran.....	62
4.1.2 Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah	67
4.1.3 Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah	71
4.2 Proses Perumusan Kebijakan Anggaran	74
4.2.1 Proses Perumusan RAPBD.....	79
4.2.2 Proses Pembahasan Rancangan dan Penetapan APBD	88
4.2.3 Program dan Alokasi Anggaran.....	94
BAB V KEPENTINGAN POLITIK DAN PERUMUSAN BELANJA	
 APBD	98
5.1 Kondisi Politik dan Anggaran Daerah	101
5.1.1 Kepentingan Politik Otoritas Anggaran Dalam APBD Kabupaten	
Pangandaran 2016	103
5.1.1.1 Dana Hibah Sebagai Daya Tawar Politik	107
5.1.1.2 Terbentuknya Satgas Jaga Lembur.....	112
5.1.1.3 Bantuan Motor Untuk Kepala Desa	115
5.1.2 Monopoli Dan Intervensi Penyebab Kuatnya Kepentingan Politik Dalam	
Pembahasan APBD Kabupaten Pangandaran.	118

5.1.3 Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif	123
5.2 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif.....	129
5.3 Prilaku Oportunistik Eksekutif Dalam Pembahasan APBD.....	134
5.4 Prilaku Oportunistik Legislatif Dalam Pembahasan APBD.....	136

BAB VI REPRESENTASI KEPENTINGAN PUBLIK DALAM ANGGARAN 139

6.1 Belanja Publik Dalam APBD Tahun Anggaran 2016.....	140
6.1.1 Target dan Prioritas Utama APBD Kabupaten Pangandaran 2016.....	142
6.1.1.1 Program Dan Alokasi Sektor Kesehatan	139
6.1.1.2 Program dan Alokasi Sektor Pendidikan	140
6.1.1.3 Program Dan Alokasi Sektor Infrastruktur	143
6.1.1.4 Program Dan Alokasi Sektor Pariwisata	144
6.2 Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah	154
6.3 Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Anggaran.....	157

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 159

7.1 Kesimpulan	159
7.2 Saran	162

DAFTAR PUSTAKA 164

LAMPIRAN 170